

TESIS

**PENGARUH BENCANA TSUNAMI TERHADAP PENINGKATAN *SOFT
POWER DIPLOMACY* PEMERINTAH PROVINSI ACEH
TAHUN 2004-2015**



Disusun oleh:

Risky Novialdi

(20140510041)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

TESIS

**PENGARUH BENCANA TSUNAMI TERHADAP PENINGKATAN *SOFT*
POWER DIPLOMACY PEMERINTAH PROVINSI ACEH
TAHUN 2004-2015**

Disusun oleh:

Risky Novialdi

(20140510041)

Pembimbing Tesis:

Dr. Sidik Jatmika

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

**Tesis dengan Judul : Pengaruh Bencana Tsunami Terhadap Peningkatan
Soft Power Diplomacy Bagi Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2004-2015**

Disusun Oleh :



Risky Novialdi

20141060041

Telah dipertahankan dalam ujian tesis, dinyatakan lulus dan disahkan di depan

Tim Penguji Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2016

Pukul : 13.00 – 14.00 WIB

Tempat : Ruang Study Hall, Gedung Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tim Penguji Tesis

Dr. Sidik Jatmika

Ketua Penguji

Tim Penguji Tesis

Tim Penguji Tesis

Takdir Ali Mukti, M.Si

Penguji Penguji I

Dr. Surwandono

Penguji Penguji II

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain. Dalam Tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

RISKY NOVIALDI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah mengatur setiap detail di bumi ini, termasuk kejadian bencana yang ditimpakan kepada manusia. Dalam keyakinan Islam, sudah seharusnya kita mempercayai akan adanya qadha dan qadar dari Allah bagi makhluknya, yang selalu menyiratkan makna mendalam di balik semua fenomena, termasuk salah satunya bencana tsunami di Provinsi Aceh. Shalawat bernadakan salam, kita haturkan kepangkuan nabi besar Muhammad Saw, karena atas perjuangan beliau, kita umat di akhir zaman masih bisa merasakan manisnya iman.

Bencana alam sudah menjadi fenomena biasa di alam semesta. Banjir, longsor, kebakaran, gempa dan juga tsunami adalah bentuk-bentuk bencana yang kerap kita temui dalam lingkungan kita. Sebagaimana sering dituturkan oleh ahli hikmah bahwa selalu ada makna di balik semua fenomena, kasih sayang Allah swt lebih besar daripada murkanya. Salah satu bencana terbesar yang melanda bumi ini adalah bencana gempa dan tsunami yang menimpa Provinsi Aceh pada Desember 2004 silam.

Dalam tulisan ini penulis menjelaskan tentang fenomena bencana gempa dan tsunami di Aceh tersebut, yang meliputi segenap “berkah” yang dibawa besertanya. Bencana tsunami di Aceh telah menuntun Aceh menjadi provinsi yang lebih baik dalam tata kelola wilayah dan juga memperbaiki landasannya dalam melakukan hubungan luar negeri. Setelah terjadi bencana tsunami, ada beberapa hal yang merupakan berkah tersendiri bagi provinsi Aceh, antara lain : lahirnya kesepakatan damai antara GAM dan RI (yang dapat menyelesaikan konflik panjang selama 30 tahun lebih dalam bingkai separatisme), terciptanya tata kelola dan infrastruktur yang responsif terhadap bencana yang mana tidak semua daerah di dunia ini punya hal serupa.

Melalui tata kelola dan infrastruktur bencana yang responsif ini membuat provinsi Aceh menjadi “ahli” dalam penanggulangan kebencanaan. Keahlian ini yang kemudian dapat dibagi kepada seluruh daerah lain di tingkat lokal dan juga internasional. Sehingga akhirnya dapat meningkatkan *soft power diplomacy* bagi pemerintah Provinsi Aceh dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Hal

inilah yang kami eksplor lebih dalam tulisan kami guna mengungkap makna di balik semua aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah Aceh baik di tingkat lokal maupun luar negeri, dalam kegiatan kebencanaan dan kerjasama.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam lahirnya tulisan ini, Pak Sidik Jatmika selaku pembimbing dan juga pak Takdir Ali Mukti yang telah memberikan banyak inspirasi dengan gagasan-gagasannya yang akhirnya juga banyak dicantumkan dalam tulisan ini. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada orang tua dan istri tercinta, Zuhera, yang telah setia menjadi editor dalam kesempurnaan tulisan ini.

Semoga dengan adanya tulisan ini bisa lebih memperdalam kajian tentang diplomasi kebencanaan di Indonesia, yang masih sangat minim dibahas dibandingkan dengan di negara-negara lain. Sebagai salah satu negara yang berada di jalur “*ring of fire*”, kita bangsa Indonesia harus lebih responsif dalam bidang kebencanaan, tidak hanya pasca bencana melainkan juga sebelum bencana-bencana terjadi. Terlebih lagi kita harus lebih mapan dalam hal pengurangan bencana yang kemudian dapat digunakan sebagai alat diplomasi guna memenuhi kepentingan nasional/daerah kita sendiri.

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

Risky Novialdi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kontribusi Riset	5
F. Studi Pustaka.....	5
G. Kerangka Teoritik	9
1. Diplomasi	9
2. <i>Disaster Diplomacy</i> (Diplomasi Bencana).....	12
3. Paradiplomasi	15
H. Metodologi Penelitian	17
I. Hipotesa.....	18
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II DIPLOMASI ACEH SEBELUM DAN SESUDAH BENCANA TSUNAMI	Error! Bookmark not defined.
A. Dinamika Politik Aceh.....	Error! Bookmark not defined.
B. Diplomasi Aceh Sebelum Bencana Tsunami.....	Error! Bookmark not defined.

- C. Bencana Tsunami, sebagai Media Diplomasi Aceh **Error! Bookmark not defined.**
- D. Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik GAM dan RI **Error! Bookmark not defined.**
- E. Diplomasi Aceh dengan Pihak Asing Pasca Tsunami **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Multi Donor Fund (MDF) **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Kerjasama tentang Perubahan Iklim dan Sektor Kehutanan Tingkat Para Gubernur di Berbagai Negara **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pinjaman *soft Promotion loan* Aceh-Pemerintah Jerman (KFW Bank) **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Kerjasama Di Wilayah IMT-GT Antara Indonesia, Malaysia dan Thailand, Dari Indonesia Salah Satu Perwakilannya Adalah Provinsi Aceh **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Kerjasama dengan Swiscontact dan *Canadian Cooperation Asosiation* (CCA)..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 6. Kerjasama *Indonesia-Middle East Update* (IMEU) **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PENGARUH TSUNAMI TERHADAP DIPLOMASI ACEH **Error! Bookmark not defined.**

- A. Bencana Tsunami Sebagai Modal Baru Dalam Berdiplomasi **Error! Bookmark not defined.**
- B. Bencana Tsunami Sebagai Pemersatu dan Awal Peningkatan Kualitas Ekonomi **Error! Bookmark not defined.**
- C. Peningkatan Kerjasama Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah Tsunami **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Konflik RI dan GAM **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Kurangnya Keamanan dan Kenyamanan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV DINAMIKA PENGARUH BENCANA TSUNAMI TERHADAP PENINGKATAN *SOFT POWER DIPLOMACY* PROVINSI ACEH **Error! Bookmark not defined.**

- A. Tata Ruang Yang Lebih Baik Pasca Bencana Tsunami **Error! Bookmark not defined.**
- B. Infrastruktur Pendukung Manajemen Bencana Tsunami di Aceh **Error! Bookmark not defined.**

1. Escape Buliding dan Escape Road	Error! Bookmark not defined.
2. Sirine Peringatan Tsunami	Error! Bookmark not defined.
3. <i>Tsunami and Disaster Mitigation Research Center</i> (TDMRC)	Error! Bookmark not defined.
4. Museum Tsunami Aceh.....	Error! Bookmark not defined.
C. Wewenang Yang Luas Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Aceh	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel I. Upaya Penyelesaian Konflik Aceh	41
Tabel II. Perkembangan PMDN hingga tahun 2013	44
Tabel III. Perkembangan PMA hingga tahun 2013	45
Tabel IV. Perbandingan RTRW berdasarkan Qanun yang diterbitkan sebelum dan sesudah Tsunami	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar I . Peta Aceh	21
Gambar II . Gelombang Tsunami Aceh	26
Gambar III. Kerjasama IMT-GT	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Bencana memang memberikan duka yang mendalam bagi sebagian besar umat manusia. Hal ini dikarenakan bencana memberikan kerugian yang cukup besar terhadap materiil juga immaterial mereka. Di Indonesia, salah satu bencana terbesar terjadi pada tahun 2004 yang melanda Nanggroe Aceh Darusalam, Bencana tsunami.

Selama hampir setahun, bencana ini seakan tidak memberikan dampak positif sama sekali, dan hanya memberikan duka yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Namun setahun setelah bencana tsunami ini, dampak positifnya mulai terlihat, karena mampu menyelesaikan konflik di tanah Aceh. Tsunami yang sebelumnya dianggap sebagai bencana sekarang bisa berubah menjadi “berkah” dengan menjadikan bencana tsunami sebagai dorongan untuk dilangsungkannya perundingan damai antara GAM dan RI, yang telah berkonflik lebih dari 30 tahun. Ian kelman dalam bukunya *Disaster Diplomacy*, 2012, menjelaskan tentang terjadinya bencana tsunami yang mendukung terjadinya perundingan GAM dan RI di Helsinki tahun 2005.

Bencana Tsunami menjadi alat diplomasi yang sangat efektif dan secara aktif mewujudkan kesepakatan dalam perundingan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bencana tsunami yang telah mewujudkan perundingan GAM dan RI. Penulis akan mengeksplor tentang dinamika pengaruh bencana tsunami terhadap diplomasi, terutama bagi pemerintah Aceh. Dengan Alasan tersebut maka penulis akan mengambil judul untuk penelitian ini : **Pengaruh Bencana Tsunami Terhadap Peningkatan *Soft Power Diplomacy* Bagi Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2004-2015.**

B. Latar Belakang Masalah

Berdiplomasi bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan, sejak masa kerajaan Aceh abad ke 16, Kerajaan Aceh telah melakukan hubungan diplomatik dengan pihak-pihak luar, baik itu di kawasan

Nusantara maupun juga di mancanegara. Mengenai sejarah diplomasi di Aceh pada masa kerajaan ini telah ditulis secara sistematis oleh H.M. Nur El Ibrahimy dalam karyanya yang berjudul “*Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*”. Dalam buku ini dijelaskan tentang hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kerajaan Aceh dengan pihak luar seperti Amerika, Turki, Perancis, dan Singapura. Hubungan diplomatik ini dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan mencari bantuan akibat serangan yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda.¹

Jauh melewati masa-masa tersebut, pada abad ke 19 dan 20, Aceh resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa awalnya, segala bentuk hubungan diplomatik dengan luar negeri hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Namun kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri, berupa kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang mempunyai wewenang ini adalah Provinsi Aceh, ditambah lagi dengan penguatan dari hasil penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, membuat pemerintah Aceh mempunyai peluang besar dalam mengelola sendiri pemerintahannya termasuk dalam melakukan hubungan luar negeri dengan daerah di Negara lain, namun hubungan kerjasama ini tetap dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh² pada tahun 2006, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan di Aceh, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang

¹ Nur El Ibrahimy, *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993. Hal xii

²https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus. Diakses pada 28 Februari 2016

berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh. Termasuk dalam melangsungkan hubungan diplomatik dengan daerah di Negara lain.

Dalam rangka melakukan hubungan diplomasi dengan daerah di luar negeri, bisa dilakukan dalam bingkai kerjasama kota kembar (*sister city/province*). Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pemda bersinergi dengan pemerintah pusat untuk merekatkan hubungan antar berbagai bangsa di dunia. Hubungan antara bangsa yang bisa terjalin tanpa bersifat politis (*non politic action*), secara tidak langsung juga akan mempererat hubungan dari kedua Negara, tempat daerah-daerah itu berasal.

Diplomasi yang handal memerlukan konektivitas dan berpikir *out of the box*.³ Duta besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi untuk dijual.⁴ Tinggal bagaimana diplomatnya dapat menjualnya dengan baik. Menurutnya, kita (Indonesia) mempunyai tiga asset utama sebagai unggulan, kita adalah Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, berpendudukan muslim terbanyak, dan kita adalah *super power* lingkungan dengan hutan tropis yang luas.⁵ Selain dari itu, Indonesia adalah Negara dengan rawan bencana tertinggi di dunia, apabila hal ini dapat dikelola dengan baik, maka juga akan bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Sebagai contoh Bencana tsunami yang pernah melanda Aceh.

Gempa dan tsunami di Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah menyebabkan korban meninggal lebih dari 200.000 orang di berbagai Negara. Gempa yang terjadi di Aceh ini adalah gempa terbesar selama 40 tahun terakhir.⁶ Bencana Tsunami adalah salah satu musibah yang mengandung duka, namun juga “berkah” yang mampu melahirkan perundingan antara GAM dan RI. Bahkan Ilan Kelman memasukkan kasus konflik GAM dan RI dalam salah satu sub bab dalam bukunya, yang berjudul *Disaster Diplomacy “How Disasters*

³ Takdir Ali Mukti, Paradiplomasi “*Kerjasama Luar negeri oleh PEMDA di Indonesia*”, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013

⁴ Menjual yang dimaksud bukan dalam arti menjual harga diri Negara atau bangsa, melainkan banyak hal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan menjalain hubungan diplomatik dengan bangsa atau Negara lain

⁵ Ibid

⁶ Nanin Trianawati sugito. *Tsunami*, Universitas pendidikan Indonesia, 2008. Hal 31

Affect Peace and Conflict.” Dia berpendapat bahwa kesepakatan yang terjadi antara GAM dan RI adalah salah satu bukti sebuah bencana bisa dijadikan alat untuk diplomasi dalam mewujudkan perdamaian.

Setelah terjadi bencana Tsunami, Aceh juga kemudian mempunyai kekuatan baru dalam berdiplomasi ketika melakukan kerjasama luar negeri. Di antaranya yang paling terkenal adalah hubungan kerjasama antara Aceh dengan Jepang⁷ dan Swiss dalam proses pembangunan setelah adanya kerusakan besar akibat bencana tsunami. Bencana tsunami secara langsung juga mempengaruhi *soft power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh, dalam menjalin hubungan dan mencapai kesepakatan dengan daerah lain.

Soft Power diplomacy akan lebih mudah mencapai kesepakatan dan kesepakatan apalagi kedua daerah memiliki permasalahan yang sama, tentu kekuatan ini sangat menarik untuk meningkatkan kerjasama asing untuk mewujudkan pembangunan daerah, terutama Aceh setelah dilanda bencana tsunami. Setelah bencana tsunami melanda Aceh, diplomasi pemerintahan provinsi Aceh juga meningkat, dan banyak pihak asing tertarik untuk berkerjasama dan berinvestasi. Maka dapat dipahami bahwa bencana tsunami telah berpengaruh terhadap peningkatan diplomasi di Aceh.

Bedasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* pemerintahan Aceh, sehingga mampu membawa provinsi Aceh pada posisi yang menarik bagi pihak asing untuk berkerjasama dan berinvestasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa bencana tsunami berpengaruh terhadap peningkatan *soft power Diplomacy* bagi Pemerintahan provinsi Aceh tahun 2004-2015?

⁷<http://www.acehprov.go.id/news/read/2015/11/27/2778/gubernur-kerjasama-aceh-jepang-terjalinkan-karena-kesamaan-karakter-geologis.html>, Diakses pada 27 Februari 2016

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan alasan utama dilakukannya suatu penelitian, dimana hasil penelitian yang diperoleh berdasar pada kerangka berfikir ilmiah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Kebenaran bahwa Tsunami memang telah menjadi alat diplomasi bagi pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut dimana saja peluang diplomasi bencana ini bisa digunakan.
3. Untuk mengetahui apakah tsunami memang mempengaruhi *soft power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh.
4. Memenuhi salah satu persyaratan dalam proses akademika di pasca sarjana universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kontribusi Riset

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa kontribusinya untuk masyarakat juga bidang ilmu yang diteliti. Penelitian ini akan mempunyai kontribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini akan semakin mengembangkan kajian di bidang akademik tentang Diplomasi Bencana.
2. Memberikan penyadaran kepada pemerintah juga masyarakat tentang alat diplomasi modern yang efektif dan efisien.

F. Studi Pustaka

Kajian tentang diplomasi bencana bukan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia akademisi. Sudah banyak peneliti yang membahas tema ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun tidak begitu dengan di dunia praktis, diplomasi bencana masih sulit dipahami bagi sebagian kalangan, baik itu pejabat pemerintahan, begitu juga dengan masyarakat. Apalagi jika disandingkan dengan istilah “kapitalisasi bencana”, hal ini bisa langsung ditolak. Meskipun demikian, para akademisi terus mengkaji tema ini secara mendalam, Sebagaimana yang dituliskan oleh Andi Amitya Resty Dwiyantri, dalam tesisnya yang berjudul

“*Peran Diplomasi bencana Alam dalam Praktik Paradiplomasi*” yang mengambil studi kasus dari tempat asalnya sendiri yaitu Sulawesi Selatan.⁸

Dalam karyanya tersebut, Amitya mengkritisi tentang kinerja penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, dan mengharapkan ada perubahan yang semula hanya berupa aksi cepat tanggap menjadi pengurangan resiko dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar yang lebih mapan dalam hal penanggulangan bencana. Pengurangan resiko bencana apabila dapat dilaksanakan dengan baik akan menekan jumlah korban menjadi lebih sedikit. Salah satu kerjasama dalam lingkup paradiplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan Sulawesi selatan adalah dengan *Australia Indonesia Facility for Disaster reduction (AIFDR)*.⁹ Dalam penelitiannya Amitya juga memaparkan bahwa masih banyaknya pejabat daerah yang belum mengerti dan mengetahui bahwa pemerintah daerah boleh melakukan kerjasama dengan pihak asing dengan inisiatif dari daerah itu sendiri, tidak harus dimulai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjalin hubungan dengan pihak asing, untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Selain itu ada juga yang menulis dengan konsentrasi yang sama, yaitu jurnal penelitian dari Dr. Surwandono dan Ratih Herningtyas dalam karya yang berjudul, *Diplomasi bencana alam sebagai sarana kerjasama internasional*.¹⁰ Dalam penelitian ini disebutkan tentang peluang-peluang yang dimiliki Indonesia jika dapat mengkapitalisasikan bencana. Indonesia dengan potensi bencana yang cukup besar dapat menjalin hubungan luar negeri, dalam bentuk kerjasama untuk menanggulangi bencana atau kerjasama di bidang lainnya seperti kerjasama peningkatan teknologi dan pertukaran informasi.

Hubungan internasional seringkali mengalami stagnasi dalam lingkaran siklus balas membalas kebijakan, sehingga bencana alam yang datang tiba-tiba di suatu Negara akan dipahami sebagai peluang untuk melalui siklus baru

⁸ Andi Amitya Resty Dwiyantri, dalam tesisnya yang berjudul “*Peran Diplomasi bencana Alam dalam Praktik Paradiplomasi*”, Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014

⁹ Ibid

¹⁰ Ratih Herningtyas dan Surwandono, *Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

berdasarkan kerjasama. Snyder menyebutkan bahwa Diplomasi bencana alam antar negara yang bertujuan untuk meningkatkan *soft power* juga menjadi kajian yang menarik, karena *soft power* dapat diraih sebagai hasil diplomasi bencana alam. *Soft power* sendiri adalah konsep yang dipopulerkan Joseph Nye, yang bermakna kemampuan suatu pihak untuk memperoleh kepentingannya tanpa dengan koersi atau paksaan.¹¹

Negara yang memilih *soft power* sebagai basis kekuatan diplomasi, lebih menggantungkan pada kemampuannya untuk bekerjasama dalam mewujudkan tujuan. Strategi diplomasi ini ditelaah lebih efisien secara biaya daripada strategi “*carrot and stick*” yang berbasis paksaan. Negara yang banyak memberikan bantuan dalam penanganan bencana akan dihormati dan dituakan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan posisi tawar negara pemberi bantuan tersebut dalam interaksi internasional. Sementara itu timbal balik kerjasama yang saling menguntungkan sering muncul setelah diplomasi bencana alam dilakukan.¹²

Dalam Praktiknya, Diplomasi Bencana alam lebih bersifat politis, sedangkan untuk kerjasama terkait bencana alam lebih bersifat teknis, dan ketika yang bersifat teknis bermuatan politis maka disinilah disebut sebagai proses diplomasi. Secara tersirat, bencana juga akhirnya dapat menjadi kekuatan dalam memulai sebuah kerjasama dalam wujud diplomasi baik itu dalam praktik teknis ataupun politis atau juga kombinasi keduanya.

Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Ilan Kelman dengan tulisannya yang berjudul *Disaster Diplomacy, How Disaster affect peace and conflict*. Bisa dikatakan penelitian Kelman adalah yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan tentang diplomasi bencana kepada masyarakat internasional. Dalam bukunya Kelman menjelaskan tentang praktek diplomasi bencana yang telah dilakukan di dunia, seperti kesuksesan *disaster diplomacy* antara Amerika dan Quba, Iran dan USA, Yunani dan Turki, Eritrea dan Ethiopia dan juga dalam kasus perdamaian konflik Aceh (antara GAM dan RI).¹³

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy 'How Disaster affect Peace and Conflict*, New York, Routledge, 2012. Hal 20-40

Penelitian Ilan Kelman ini cukup luas namun tidak mendalam, mengingat banyaknya topik yang diangkat. Namun keluasan pembahasannya ini cukup memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Ilan Kelman juga membahas tentang bagaimana *disaster diplomacy* ini dapat berjalan dengan baik, salah satunya dibutuhkan dukungan dari media. Kelman menyebutkan :

*The Media are often particularly prominent in lobbying for disaster diplomacy. They can go too far, possibly to the point where expectations are raised beyond realistic outcomes, as occurred for India-Pakistan in 2001. They could also go to the point where decision-makers react adversely to suggestions on how they should act vis-à-vis disaster diplomacy, as occurred for Iran-USA after the 2003 earthquake. Rather than spurring them toward disaster-related peace, the leader might go out of their way to avoid dealing with an enemy. This action would show that they do not need disaster-related assistance and they will never compromise their 'principles' by collaborating with a nemesis.*¹⁴

Ilan Kelman juga membahas tentang diplomasi lingkungan (*environmental diplomacy*) dan juga *disaster para-diplomacy*.¹⁵ Kedua konsep ini muncul akibat perkembangan dari *disaster diplomacy* yang lingkupannya bisa terus diperluas, karena kajian tentang diplomasi bencana, dengan sendirinya akan berkaitan dengan bidang-bidang lain.

Dari ketiga penelitian di atas telah menunjukkan bahwa tema tentang diplomasi bencana bukan suatu hal yang baru, akan tetapi yang membuat penelitian dari penulis berbeda dengan ketiga penelitian di atas adalah penelitian kami akan lebih menfokuskan diri di pemerintahan Aceh saja, yang notabeneanya memiliki kewenangan lebih dari pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya dan juga dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing. Selain itu penulis juga akan menfokuskan pada bencana tsunami yang terjadi tahun 2004 di kota banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi Aceh. Untuk lebih memperdalam lagi, penulis juga akan meneliti peningkatan *soft power diplomacy* dalam diri pemerintahan Aceh setelah bencana tsunami terjadi.

¹⁴ Ibid. Hal 148-149

¹⁵ Ibid. hal 119-122

G. Kerangka Teoritik

Dalam mengkaji sebuah obyek penelitian dibutuhkan kerangka teoritik yang memadai untuk alat kajiannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut :

1. Diplomasi

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan antar aktor-aktor hubungan internasional lainnya.¹⁶

Menurut Pannikar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy*, beliau menyatakan, “*diplomasi dalam hubungannya dengan pihak internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.*”¹⁷

Diplomasi bertujuan agar pembicaraan mengenai berbagai masalah mencapai kesepakatan yang sesuai atau sekurangnya tidak terlalu merugikan kepentingan nasional masing-masing. Unsur pokok dalam diplomasi adalah negosiasi. Menurut Herb Cohen, *Negosiasi adalah penggunaan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi sikap dalam suatu “jaringan ketegangan”*. Maka dari itu negosiasi ini dilakukan bisa saja menyangkut hajat hidup orang lain dan juga kehidupan pribadi.¹⁸

a. Diplomasi Modern

Pada pandangan secara tradisional, perkembangan diplomasi sangat melekat pada kewenangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri dan merencanakan strategi-strategi pelaksanaannya.¹⁹ Diplomasi

¹⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008. Hal 3-4

¹⁷ S.L Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1995. Hal. 4

¹⁸ Herb Coben, *Negosiasi*, Pantja Simpati: Jakarta, 1986. Hal. 14

¹⁹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi ‘kerjasama luar negeri oleh pemda di indonesia’* The Phinisi press, 2013. Hal.160

seperti ini sejalan dengan pengertian diplomasi yang dijelaskan oleh Berridge (1995), “*Diplomacy is the conduct of international relation by negotiation rather than by force, propaganda, or recourse of law, and by other peaceful mean such as gathering information or engendering goodwill which are either directly or indirectly designed to promote negotiation.*”²⁰

Diplomasi merupakan tata cara dalam melakukan hubungan internasional yang lebih mengutamakan jalur negosiasi dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer, propaganda atau ikatan-ikatan hukum yang memaksa, namun melalui cara-cara yang damai seperti pengumpulan informasi yang akurat (agar tidak mispersepsi antar bangsa) atau melahirkan niat-niat baik para aktornya yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mendorong terselenggaranya negosiasi.

Pada masa diplomasi memasuki masa modern, pemaknaan diplomasi sedikit bergeser terutama dari segi aktor dan sarana yang digunakan dalam berdiplomasi, meskipun tujuannya masih sama yakni mendorong terjadinya negosiasi. Pergeseran dari diplomasi tradisional ke diplomasi modern mengakibatkan beberapa perubahan, yaitu :

1) Berubahnya Para Aktor Diplomasi

Pada era modern, aktor dalam diplomasi tidak hanya melibatkan pemerintah dengan pemerintah, melainkan muncul aktor-aktor baru seperti etnis-etnis masyarakat (*sub-State actor*), pemerintah daerah dan kota, kelompok masyarakat dan juga aktor perorangan (*people to people diplomacy*).²¹

2) Berubahnya Jalur Diplomasi

Dalam diplomasi tradisional, diplomasi hanya satu jalur diplomasi (*one Track diplomacy*), yang hanya melibatkan pemerintah suatu Negara dengan pemerintah di Negara lain (*government to government*). Pada diplomasi modern sudah ada jalur baru yang digunakan dalam berdiplomasi atau dikenal dengan ‘*second track diplomacy*’ yaitu upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh

²⁰ Berridge, GR, *Diplomasi, Theory and practice*, Maryland: Prentice hall/Harvester Wheatscheaf, 1995.

²¹ Op.cit. hal 163

elemen non pemerintah secara resmi. *Second track diplomacy* juga dikenal dengan *citizen diplomacy* (diplomasi publik).²²

Perkembangan lebih lanjut memunculkan diplomasi jalur baru, *multi track diplomacy*, yang merupakan sebuah cara konseptual untuk melihat proses penciptaan perdamaian dunia sebagai sebuah sistem yang hidup. Segala aktifitas dalam kehidupan saling berhubungan dalam mewujudkan perdamaian dunia, baik itu aktifitas antarNegara, individu juga komunitas-komunitas lainnya yang lebih luas.

3) Berubahnya Sarana Diplomasi

Diplomasi modern juga mendorong penggunaan sarana diplomasi yang lebih luas, yang diadopsi dari segala aktivitas ataupun peristiwa dalam kehidupan. Sarana diplomasi ini seperti, politik, publik, budaya, pendidikan termasuk juga bencana alam. Melalui sarana diplomasi yang lebih fleksibel ini akan mendorong negosiasi yang lebih baik.

4) Tsunami Sebagai Alat Diplomasi

Tsunami merupakan sebuah bencana alam yang menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Tsunami di Aceh salah satunya, menurut data dari badan penanggulangan bencana, kerugian dari segi ekonomi akibat dari bencana gempa dan tsunami di Aceh termasuk wilayah Nias mencapai US\$ 4.45 Milyar. Belum lagi kerusakan bangunan dan psikologis.

Ilan Kelman dalam bukunya *disaster diplomacy* menjelaskan bahwa bencana tidak hanya akan memberikan duka saja, namun apabila dapat dikelola dengan baik, akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan wilayah yang ditimpa tsunami tersebut, baik untuk urusan pembangunan kembali akibat bencana, maupun untuk penyelesaian konflik di daerah tersebut. Dalam hal ini konflik separatisme yang melibatkan daerah tsunami Aceh antara GAM dengan RI.

Bencana tsunami di Aceh ini, bisa digunakan sebagai alat diplomasi dalam mendorong negosiasi perdamaian antar kedua belah pihak, yang beberapa tahun sebelumnya selalu gagal mencapai kesepakatan damai. Namun pada tahun 2005,

²² Ibid

atau tepatnya setahun setelah bencana tsunami terjadi, kesepakatan damai ini bisa tercapai dengan ditandatanganinya kesepakatan damai di Helsinki.

Dari peristiwa tersebut disimpulkan bahwa bencana tsunami dapat menjadi sarana yang baik dalam berdiplomasi. Terkait bagaimana sebuah bencana mampu mempengaruhi sebuah perundingan, penjelasan tentang ini akan menjadi pembahasan inti dari tulisan ini dan akan dipaparkan dalam bab IV. Pada akhir bab ini diketahui bahwa bencana tsunami bisa mempengaruhi perundingan, terkait teknis hubungan antara bencana dan perundingan akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Penggunaan bencana sebagai sarana diplomasi tidak hanya sebagai alat menyelesaikan konflik Aceh, namun juga sebagai sarana kerjasama pemda Aceh dengan pihak luar guna pembangunan Provinsi Aceh.

2. *Disaster Diplomacy (Diplomasi Bencana)*

Diplomasi bencana menggabungkan dua kata yang cukup umum. Definisi *Oxford Dictionary* dari ‘bencana’ adalah kecelakaan tiba-tiba atau bencana alam yang menyebabkan kerusakan besar atau korban jiwa. Kata kedua, ‘diplomasi’, pada tingkat dasar itu kontras dengan perang yang mana diplomasi diartikan sebagai sisi damai politik, di mana negosiasi adalah jalan pilihan untuk perubahan.

Ketika dua kata dipakai dalam waktu yang sama, merupakan sebuah upaya untuk melahirkan sebuah gagasan baru tentang bagaimana sebuah bencana bisa digunakan untuk sarana berdiplomasi di tingkat nasional dan Internasional. Salah satu tokoh yang mendukung perkembangan gagasan ini adalah berasal dari Ilan Kelman, yang berkontribusi banyak berupa laporan dan artikel tentang diplomasi bencana, semua yang memuncak dalam bukunya yang dipublikasi pada 2012 tentang diplomasi bencana, *Disaster Diplomacy ‘How disaster affect peace and conflict’* (Diplomasi Bencana: Bagaimana Bencana Mempengaruhi Perdamaian dan Konflik).²³

Pandangan Kelman tentang dunia diplomasi bencana adalah bagaimana sebuah bencana bisa memberikan kesempatan/peluang untuk melakukan sebuah

²³ Op.Cit, Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy* , 2012

kerjasama dalam membangun perdamaian. peluang ini menampakkan diri di waktu baik sebelum dan sesudah bencana, yang berarti bahwa setiap kerjasama terkait bencana dipahami untuk menjadi bagian dari diplomasi bencana. Sebagai gambaran aktivitas pra-bencana, salah satu contoh sukses dari kerjasama dari basis bencana adalah kolaborasi ilmuwan Amerika dan Kuba terhadap penyediaan sistem pemantauan badai. Pada dasarnya, Amerika dan Kuba adalah Negara yang saling bermusuhan, namun karena ada permasalahan yang sama, yaitu badai, maka bisa digunakan sebagai alat diplomasi menuju perdamaian.

a. Penilaian Sukses *Disaster Diplomacy*

Diplomasi ini mengenai bagaimana cara agar kita mampu mengubah situasi.²⁴ Kelman menemukan bahwa diplomasi bencana biasanya menghasilkan dampak sebagai berikut : jangka pendek, jangka panjang, dan efek sebaliknya dari yang diinginkan. Hasil jangka pendek terjadi ketika bencana menyediakan jalan baru untuk negosiasi antara pihak yang bermusuhan. Jadi, untuk menyukkseskan hal ini perlu ada “landasan” untuk negosiasi. Hasil jangka panjang adalah prasangka baik yang sudah ada merupakan faktor kuat dalam diplomasi. Sedangkan yang dimaksud dengan efek sebaliknya adalah disebabkan kedekatan selama kerjasama penanggulangan bencana memudar, dan konflik kembali terjadi. Terlepas dari hasil yang berpotensi negatif, kenyataannya tetap respon terhadap bencana biasanya membawa masyarakat yang bermusuhan menjadi damai, meskipun untuk beberapa saat.

Kesuksesan dari sebuah diplomasi bencana dapat dipahami adalah ketika pihak-pihak yang bertikai dapat meninggalkan perselisihan mereka dan melihat iktikad baik dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah hubungan baru dalam konsep perdamaian. Diplomasi bencana dalam kajian Ilan Kelman lebih banyak mengkaji tentang bagaimana mempengaruhi bencana dan konflik. Pada perkembangannya, pada saat dunia diplomasi yang semakin modern, membuat diplomasi bencana juga berpotensi menarik dalam melaksanakan kerjasama luar negeri dalam rangka memenuhi kepentingan nasional/daerah.

²⁴ Athur Clarke, An Intrview With Ilan Kelman : Article

Ketika sebuah negara/daerah yang pernah dilanda bencana, kemudian mampu bangkit dari keterpurukan bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya, lalu dapat membagikan kemampuan tersebut kepada pihak lain, daerah ini akan menjadi daya tarik bagi pihak asing untuk berkerjasama. Berdasarkan logika tersebut dapat dipahami bahwa provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mempunyai keahlian dan daya tarik dalam hal menanggulangi bencana.

b. *Disaster Diplomacy* di Aceh

Provinsi Aceh terletak di provinsi barat laut Sumatera, Indonesia, dan merupakan salah satu daerah dengan dampak paling parah akibat tsunami 2004. Selain itu, menurut catatan sejarah, Aceh telah menjadi salah satu daerah konflik sejak pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibentuk pada tahun 1976. Pemberontakan pertama dengan cepat ditekan, tetapi GAM semakin dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang banyak disebabkan oleh militer. Perlawanan terus berlanjut sampai tahun 1998 ketika kediktatoran militer Suharto berakhir, ditambah dengan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya yang tetap menggunakan cara militer.

Ketika Tsunami terjadi, tiga peristiwa penting meletakkan dasar yang kuat untuk kemungkinan perdamaian. *Yang pertama* adalah de-militerisasi Indonesia. *Yang kedua* terjadi ketika DPR mengesahkan undang-undang pada tahun 2004, yang mana UU tersebut diperlukan militer untuk melepaskan semua usaha aktifitasnya. *Yang ketiga* terjadi ketika militer tidak lagi mampu untuk memesan kursi di parlemen. Hasilnya adalah perjanjian perdamaian abadi yang ditandatangani pasca tsunami dalam bentuk MoU antara pemerintah RI dengan GAM di Helsinki pada 2005.

Dari penjelasan Ilan kelman yang menjelaskan bahwa bencana di Aceh telah menjadi solusi penyelesaian konflik di Aceh. Namun pada perkembangannya, ternyata diplomasi bencana tidak hanya mampu menjadi solusi konflik melainkan juga peningkatan perekonomian melalui kerjasama dan investasi.

3. Paradiplomasi

Sebagaimana *disaster diplomacy*, paradiplomasi juga masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, panayoyis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah ‘*parallel diplomacy*’ menjadi ‘*paradiplomacy*’, yang mengacu pada makna ‘*the foreign policy of non central governments*’, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah ‘*Micro Diplomacy*’.²⁵

Dalam perkembangan hubungan internasional, aktor kerjasama Internasional tidak lagi hanya diperankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga sudah mulai mengambil peran dengan melewati batas-batas Negara mereka, namun juga ada ketentuan dari Negara tempat mereka berasal,²⁶ ini artinya daerah diperbolehkan berkerjasama dengan daerah lain namun tetap dalam bingkai Negara asalnya. Dari penjelasan ini maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah, terlebih daerah yang mempunyai perlakuan khusus dan istimewa juga harus mempunyai keahlian dalam berdiplomasi juga dalam peningkatan *soft power diplomacy*-nya, agar daerah tersebut dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

a. *Disaster Para-Diplomacy*

Dari kolaborasi antara diplomasi bencana dengan paradiplomasi ini, penulis akan mengidentifikasi peluang dari kerjasama antara pemerintah Aceh dengan pihak asing. Sehingga dapat disimpulkan tentang peran bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintah Aceh.

²⁵ Dikutip dari buku Crikemas, David, *Are The boundaries between Paradiplomacy and diplomacy watering down?* Dalam buku “*Paradiplomacy*” Takdir Ali Mukti Hal. 37-38

²⁶ Ketentuan ini di setiap Negara-negara di dunia mempunyai peraturan yang berbeda dalam mengatur kerjasama yang boleh dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan pihak asing

Dalam bukunya Ilan Kelman, *Disater Dipolmacy*, beliau juga sedikit membahas tentang *disaster-para diplomacy*, yakni diplomasi yang dapat dilakukan oleh pihak sub-national. Ilan Kelman menyebutkan:

*Disaster Para-Diplomacy explores Disaster diplomacy for non-sovereign jurisdictions. That is, sub-national entities interacting directly with foreign governments or international organitations for disaster-related activities.*²⁷

b. Soft Power Diplomacy

Soft Power Diplomacy adalah sebuah konsep diplomasi non tradisional yang mulai berkembang pasca abad ke-21. Salah satu tokoh yang paling terkenal dengan munculnya *soft power diplomacy* ini adalah Joseph Nye, Jr (1990).²⁸ *Soft Power Diplomacy* atau *soft diplomacy* ini diartikan sebagai pertukaran gagasan, informasi, seni dan aspek-aspek kebudayaan lain antara Negara dan bangsa, dengan harapan dapat menciptakan pengertian bersama. Keberhasilan *soft power diplomacy* ini sangat bergantung pada reputasi pelaku dalam komunitas internasional serta pertukaran informasi di antara para pelaku.²⁹

Soft diplomacy bersumber dari *soft power diplomacy* sebagai lawan kata dari *hard power diplomacy*. *Soft Power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh suatu Negara (daerah) melalui penampilan bangsa itu di mata Negara lain, bukan dengan jalan pemaksaan atau dengan pembayaran. Inti dari *soft power* adalah eksplorasi kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non perang dan non pengikatan secara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk melakukan diplomasi dengan Negara³⁰ atau daerah lain.

Dalam perkembangannya, *Soft Power* ini bisa melingkupi banyak hal yang ada di suatu daerah, termasuk bencana yang kemudian bisa digunakan sebagai alat berdiplomasi. Provinsi Aceh adalah salah satu daerah dengan peluang besar untuk

²⁷Kelman, Ilan, *Disaster Diplomacy* Hal. 122

²⁸<http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html>, Diakses pada 27 Februari 2016

²⁹ Dikutip dari Asisten Deputi Bidang pelaksanaan dan pelaporan persidangan, Thanon Aria Dewangga, dalam buku karya Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi*, Hal 171

³⁰ Ibid. hal 172

menggunakan *soft power* ini dengan menggunakan bencana tsunami sebagai alat berdiplomasi dengan daerah di Negara lain.

Dengan menggunakan beberapa kerangka teori ini diharapkan mampu menganalisa dan menemukan hasil yang sistematis terkait tema yang diambil, yaitu penggunaan bencana alam sebagai sarana peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintahan provinsi Aceh.

H. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung sistematika penulisan yang baik dan hasil penelitian yang baik pula, maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan tema dan konsentarsi yang dipilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di Aceh setelah bencana tsunami dan pengaruhnya terhadap peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah Aceh.

2. Lokasi dan jangkauan penelitian

Untuk menghindari pelebaran pembahasan, maka penulis hanya akan menfokuskan pembahasan untuk provinsi Aceh pada tahun 2004-2015. Selain itu, penelitian ini juga akan fokus pada bencana tsunami saja tidak untuk bencana-bencana lain.

3. Metode pengumpulan data

Untuk data Primer, Penulis akan langsung melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema ini, yaitu para pejabat atau pegawai di bidang BKPM provinsi Aceh. Untuk tambahan, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), sehingga menghasilkan data-data sekunder. Data tersebut akan diambil dari buku-buku literatur, kitab-kitab, laporan-laporan hasil penelitian sebelumnya, jurnal, majalah, dokumen, surat kabar, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Setelah seluruh data terkumpul, maka kemudian akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan teknik kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dikaitkan antara fakta satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dari hasil analisis, penulis akan berusaha untuk menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh dari bencana tsunami terhadap diplomasi, baik itu dalam menyelesaikan perundingan antara GAM dan RI dan juga dalam kerjasama internasional dalam mewujudkan pembangunan Aceh, dan yang paling utama adalah peningkatan *soft power diplomacy* bagi pemerintah Aceh.

I. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengemukakan beberapa hipotesa, yaitu :

1. Bencana Tsunami telah menempatkan provinsi Aceh sebagai sebuah daerah yang mempunyai citra yang baik ketika mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi ahli dalam penanggulangan bencana, melalui suprastruktur dan infrastruktur yang ada di provinsi Aceh.

2. Kemampuan provinsi Aceh dalam menanggulangi tsunami bisa dibagi dengan negara lain, sehingga kemampuan mengelola bencana tsunami ini bisa menjadi peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah Provinsi Aceh, yang berguna untuk meningkatkan kerjasama luar negeri dan investasi.

J. Sistematika Penulisan

Dalam upaya penyusunan tulisan ini, akan dibuat sesistematis mungkin yang dirangkum dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Berisikan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Terdiri dari pembahasan tentang Biografi Aceh secara umum, kemudian dilanjutkan dengan Sejarah diplomasi Aceh sebelum terjadi Bencana Tsunami serta Undang-undang tentang wewenang pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama internasional. Selanjutnya juga Diplomasi di Aceh setelah

bencana tsunami, perundingan antara GAM dan RI di Helsinki, dan juga kerjasama-kerjasama yang pernah terjalin dengan pihak asing dengan dasar kerjasama terkait bencana alam.

BAB III terdiri dari pembahasan tentang Diplomasi, pembahasan tentang hasil yang didapat akibat dari tsunami di provinsi Aceh, peningkatan *Soft Power diplomacy* bagi pemerintahan Aceh, Kerjasama-kerjasama yang terjalin dari penggunaan *soft power diplomacy* tersebut dari berkah bencana tsunami.

BAB IV terdiri dari penjelasan tentang mekanisme pengaruh bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* di provinsi Aceh, lahirnya suprastruktur dan infrastruktur yang menunjang peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah Aceh.

BAB V terdiri dari Kesimpulan dan saran tentang penelitian ini serta masukan-masukan kepada pemerintah Aceh agar lebih mampu mengoptimalkan kerjasama luar negerinya.